

**KADERISASI PARTAI POLITIK DAN KESIAPANNYA
MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
TAHUN 2015:
KASUS USUNGAN NON-KADER DPD PAN KABUPATEN MAJENE**

Muhammad¹

¹Program Studi Ilmu Politik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

Email: muhammadamed@yahoo.co.id

Abstrak

Indikator keberhasilan partai politik dalam melakukan kaderisasi, salah satunya dengan melihat kemampuannya dalam mempersiapkan kadernya di setiap momentum kontestasi politik. Hal tersebut karena setiap partai politik tentu mempunyai karakteristik tersendiri dalam garis perjuangan dan ideologi dimana hanya orang-orang yang telah melalui proses kaderisasi yang paling memahami karakter partai politiknya. Tentu menjadi ironi ketika terdapat partai politik yang mengusung calon kepala daerah yang bukan merupakan kadernya. Padahal ideologi dan prinsip garis perjuangan tersebut idealnya menjadi pedoman wajib bagi setiap partai politik dalam menjalani peran strategisnya dalam sistem politik.

Penulisan ini memiliki fokus melihat fenomena DPD PAN kabupaten Majene yang mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha yang bukan merupakan kader PAN. Ironi, mengingat PAN merupakan partai pemilik kursi terbanyak di DPRD kabupaten Majene sekaligus kadernya adalah ketua DPRD. Fakta tersebut cukup mendeskripsikan PAN sebagai partai terbesar di Majene yang mestinya mempunyai infrastruktur mapan dan sangat layak jika dalam Pemilukada serentak Majene mengusung kadernya sendiri. Dari fokus masalah ini, akan disusun kerangka teoritis dan gagasan penulis dalam melihat formulasi hingga mekanisme kaderisasi yang seyogyanya dijalankan bagi partai politik. Demikian juga pada proses rekrutmen politik untuk diusung dalam Pilkada, juga akan diulas perihal harapan dan tantangannya bagi partai politik.

Tujuan penulisan untuk menjadi referensi alternatif dalam melihat dinamika partai politik di tingkat lokal, khususnya kabupaten Majene. Sekaligus menjadi rekomendasi bagi partai politik agar fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya dapat berjalan sebagaimana mestinya, demi proses konsolidasi demokrasi ideal di Indonesia.

Kata Kunci : Kaderisasi, Rekrutmen Politik, PAN, Pemilukada Majene.

Abstract

One of the successful indicator of political party to conduct the forming of cadres is by seeing its ability in preparing its cadres in every momentum of political dispute. In accordance with those matters, each political party certainly have characteristic itself in the line of struggle and ideology in cases where just people who had passed the forming of cadres process that more understand the character of its political party. Therefore, it can be irony if there is political party who carry the candidate of district head that not derive from its cadres. Whereas, the ideology and the principle line of struggle ideally become

compulsory orientation for each political party toundergo its strategic role in political system.

The focus is to identify the phenomenon of DPD PAN at Majene Regency who carrycandidate pair for regent and deputy of regent Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha that not derive from the cadres of PAN. Ironically, considering that PAN constitutes the party by a majority chair in DPRD (Legislative Assembly at Regency) of Majene Regency all at once its cadres are the head of DPRD. That fact precisely describe PAN as the greatest party in Majene that surely have proper infrastructure and very suitable if in General Election of the District Head jointly in Majene to carry its cadres itself. From the focus of this Problem, it will be arranged theoretical framework and the writer idea in looking at formulation till mechanism of the forming of cadres that properly be operated for political party. Moreover, at the process of political recruitment to be carried in General Election of the District Head, it will be also reviewed the expectation and its challenge for political party.

The aim is become alternative reference in seeing the dynamic of political party at the local degree, especially khususnya kabupaten Majene. Accordingly, it become recommendation for political party in order that the function of the forming of cadres and its political recruitment can fare well properly for the sake of the process of ideal democracy consolidation in Indonesia.

KeyWords: The Forming of Cadres; Political Recruitment; PAN; General Election of the District Head of Majene.

Pendahuluan

Asumsi bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan bahwa demokrasi modern tidak terbayangkan tanpa partai politik,¹ menjadikan peran strategis partai politik dalam sebuah sistem demokrasi sebagai fokus yang selalu hangat untuk dikaji. Begitu pun dalam menelaah demokratisasi di tingkat lokal misalnya Pemilu kada, utamanya dalam melihat persoalan performa partai politik dalam menjalankan fungsi idealnya. Adapun dalam penulisan ini akan fokus melihat performa partai politik tersebut dalam aspek kaderisasi dengan sedikit juga menyinggung keterkaitannya dengan aspek rekrutmen partai politik.

Fenomena yang terjadi pada momentum Pemilu kada serentak di kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi kajian menarik perihal kaderisasi dan rekrutmen politik yang dilakukan DPD PAN Kabupaten Majene. Sebagai partai politik pemenang Pemilu legislatif di Majene dimana kadernya pun sebagai ketua DPRD Kabupaten Majene, PAN sebenarnya sangat potensial untuk mengusung kadernya dalam Pemilu kada Serentak 9 Desember 2015 mendatang. Namun yang terjadi adalah DPD PAN Kabupaten Majene

¹Schattsneider, Elmer E. [1942]. *Party Government*. New York: Holt, Rinehart and Winston. hal. 1.

seakan justru melepaskan potensi tersebut dengan mengusung calon diluar kader internalnya.

Pada Pemilu serentak tahun 2015 mendatang di kabupaten Majene akan bertarung 3 pasangan calon, yaitu pasangan Drs. H. Fahmi Massiara, MH. - H. Lukman, S.Pd.; H. Arifin Nurdin, SE., MS.Ak.-A. Irfan Sulaiman, SE., M.Ap. dan Drs. H. M. Rizal Sirajuddin, MM.-DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M.Pd. Adapun PAN mengusung pasangan Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM.-DR. H. Mulyadi Bintaha, S.Pd., M. Pd. bersama PKPI. Pasangan tersebut adalah pasangan calon yang keduanya berlatar belakang sebagai birokrat, yang berarti juga adalah bukan merupakan kader partai politik. Berbeda dengan 2 pasangan calon lainnya yang merupakan kader partai politik. Adapun Drs. H. Fahmi Massiara, MH. juga berlatar belakang birokrat, namun pasangannya adalah kader senior partai Golkar kabupaten Majene.

Idealnya dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, partai politik merekrut kader internalnya. Hal tersebut penting, sebab salah satu indikator keberhasilan sebuah partai politik dalam melakukan kaderisasi adalah tersedianya kader untuk dapat disiapkan dalam momentum kontestasi politik seperti Pemilu. Tentu disayangkan dimana kader adalah orang yang telah melalui proses kaderisasi yang di dalamnya ditanamkan setiap prinsip, garis perjuangan dan ideologi partai politik namun ketika momentum kontestasi tiba, justru partai politik merekrut figur di luar kader internalnya. Dengan demikian, apa yang sebenarnya telah menjadi prinsip, garis perjuangan dan ideologi partai politik sulit untuk diterjemahkan nantinya oleh calon non-kader yang diusung ketika menempati jabatan politik. Hal tersebut tentu juga akan menjauhkan realitas politik dari nilai-nilai idealisme yang mana setiap partai politik memiliki karakteristik dalam idealismenya.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan memaparkan perihal kaderisasi dan kesiapan partai politik menghadapi Pemilu serentak tahun 2015 dengan melihat fenomena DPD PAN kabupaten Majene yang mengusung pasangan calon non-kader. Selain itu, juga akan dilengkapi ulasan perihal rekrutmen partai politik, yang mana fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dalam makalah ini dipandang sebagai dua hal yang saling melengkapi untuk mengkaji fokus masalah. Penulisan ini menyajikan model ideal kaderisasi dan rekrutmen partai politik agar setiap nilai-nilai idealisme partai politik dapat diterjemahkan dalam setiap realitas politik, khususnya di kabupaten Majene. Hal tersebut

karena hanya orang-orang yang telah melewati proses kaderisasi yang diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai idealisme partai politik sebagai pedoman wajibnya dalam menjalankan peran politik masing-masing.

Tinjauan Teoritik

Dalam menelaah masalah pada penulisan makalah ini, bagian tinjauan teoritik akan dibahas mengenai 2 masalah penting. Bahasan pertama adalah kaderisasi dan hak istimewa kader, sedangkan bahasan kedua adalah sistem rekrutmen dalam partai politik. Penjelasan setiap bahasan tersebut akan disajikan sebagai berikut.

Kaderisasi dan Ide Partai Politik

Kader partai politik didefinisikan sebagai afiliasi organisasi seorang individu kepada partai politik, yang menetapkan kewajiban dan hak istimewa bagi individu itu.² Oleh karena melekatnya hak istimewa yang dimiliki seorang kader, maka partai politik mewajibkan proses kaderisasi dalam aturan internalnya. Adapun kaderisasi diartikan sebagai proses intervensi dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individu para anggotanya agar mampu menjalankan berbagai fungsi partai.³

Umumnya dalam proses kaderisasi, partai politik melakukan proses penanaman ide partai kepada kadernya. Adapun ide partai politik dipandang penting, sebab ide tersebut memuat agenda tentang hal-hal yang perlu didiskusikan, pertanyaan yang perlu diajukan, hipotesis yang perlu dibuat sehingga jelas gambaran esensi sejati partai serta siapa sebenarnya mereka dan bukan apa yang mereka lakukan.⁴ Partai politik tanpa ide tidak memiliki landasan eksistensi dan tidak bisa melakukan tugas apapun dalam konteks politik karena ide dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru bagi solusi alternatif untuk masalah-masalah masyarakat saat ini.⁵

²Katz, Richard S. & William Crotty [2006]. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publication. hal. 490.

³Marratu Fahri. [2011]. *Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Partai Politik*. Jurnal Dinamika Vol. 4 No.7, Juni 2011. hal. 65.

⁴Ball, Terence & Richard Dagger. [2004]. *Ideals and Ideologies*. New York: Longman. hal.9.

⁵Luther, Kurt Richard & Ferdinand Muller Rommel. [2002]. *Political Parties in the New Europe*. New York: Oxford University Press. hal. 144.

Secara teoritis, partai politik diciptakan sebagai sarana untuk memungkinkan warga negara yang seide untuk mempromosikan visi mereka tentang kebaikan bersama.⁶ Sehingga dengan demikian idealnya partai dalam menjalankan peran strategisnya dalam sistem politik harus disandarkan pada pertimbangan perjuangan untuk ide partai. Oleh karena kader yang diharapkan dapat secara sempurna memahami akan ide suatu partai politik, maka dalam hal ini setiap partai politik seharusnya lebih dapat mempersiapkan kadernya dalam momentum perjuangan meraih sebuah kekuasaan politik yang strategis.

Sistem Rekrutmen dalam Partai Politik

Secara sederhana terdapat 4 sistem yang umumnya menjadi model partai politik dalam melakukan rekrutmen politik, yaitu:⁷

Tabel 1. Pola Rekrutmen Partai Politik.

Partisanship	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan untuk mencari orang yang memiliki loyalitas kepada partai. Oleh karena itu, perbedaan identitas (program maupun kebijakan) dari partai ini terhadap partai lainnya menjadi sangat penting bagi para pendukungnya.
Survival	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki sumber financial dan massa. Ini biasanya dilakukan oleh partai-partai pada saat menghadapi momen Pemilu.
Meritokratik	Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Di sini kompetensi menjadi ukuran penting.
Kompartementalisme	Rekrutmen didasarkan kebutuhan penguatan departemen-departemen yang dianggap strategis dalam organisasi. Sisi-sisi kompetensi juga mendapat perhatian penting dalam seleksi.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai partai politik dengan perolehan suara terbesar pada Pemilu legislatif tahun 2009 lalu untuk DPRD kabupaten Majene, cukup menggambarkan bahwa PAN memiliki infrastruktur yang mapan di kabupaten Majene. Dari total 25 kursi DPRD kabupaten

⁶Kemell, Samuel & Jacobson Gary. [2003]. *The Logic of American Politics*. Washington D. C: CQ Press. hal.68.

⁷Lay, Cornelis. [2006]. *Organisasi dan Manajemen Kepartaian*. Yogyakarta: Program Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. hal. 18.

Majene, PAN berhasil meraih 4 kursi yang tersebar di seluruh daerah pemilihan di kabupaten Majene.

Hal tersebut mendeskripsikan kekuatan infrastruktur yang dimiliki PAN di kabupaten Majene juga merata untuk seluruh daerah pemilihan.

Dari total 3 daerah pemilihan untuk 8 kecamatan di kabupaten Majene, PAN meraih 2 kursi di daerah pemilihan 1 (kec. Banggae dan kec. Banggae Timur), sedangkan di daerah pemilihan 2 (kec. Pamboang, kec. Sendana, kec. Tammeroddo Sendana dan kec. Tubo Sendana) dan daerah pemilihan 3 (kec. Malunda dan kec. Ulumanda) PAN masing-masing meraih 1 kursi. Adapun total 25 kursi DPRD kabupaten Majene masing-masing daerah pemilihan mempunyai proporsi yang berbeda tergantung dari rasio jumlah pemilih yang terdaftar. Dimana untuk daerah pemilihan 1, kursi DPRD kabupaten Majene yang diperebutkan adalah 11 kursi, daerah pemilihan 2 terdapat 10 kursi, sedangkan daerah pemilihan 3 hanya 4 kursi yang diperebutkan. Detail dari penjelasan di atas dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Majene Tahun 2014

No .	Partai Politik	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Jumlah Kursi
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi	
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2.922	1	3.201	1	507	0	2
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.867	1	177	0	1.867	1	2
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2.134	1	2.189	1	538	0	2
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4.073	1	4.685	1	565	0	2
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.797	1	5.563	1	1.517	0	2
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	2.130	0	2.961	1	2.937	1	2
7	Partai Demokrat	3.659	1	2.509	1	1.771	1	3
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	6.569	2	2.797	1	2.883	1	4

9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1.525	0	1.964	0	589	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2.710	1	3.359	1	909	0	2
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	3.583	1	2.271	1	21	0	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.522	1	3.911	1	165	0	2
	J u m l a h	39.49 1	11	35.58 7	10	14.26 9	4	25

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Majene

Dalam UU No. 8 tahun 2015, diatur syarat minimal bagi pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik pemilik kursi legislatif adalah 20% dari total jumlah kursi DPRD. Dengan demikian untuk kabupaten Majene, pasangan calon yang maju melalui jalur partai politik pemilik kursi parlemen disyaratkan memiliki dukungan partai politik yang memiliki minimal 5 kursi di DPRD kabupaten Majene. Oleh karena itu, pasangan calon Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. – DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd. membutuhkan partai politik pemilik kursi parlemen selain PAN untuk berkoalisi demi memenuhi syarat pencalonan.

Terbentuknya koalisi PAN dan PKPI lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. – DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd. Dimana koalisi tersebut telah melewati syarat minimal dukungan partai politik pemilik kursi parlemen karena total 6 kursi parlemen yang mendukung pasangan calon Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. – DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd. Adapun pasangan tersebut adalah pasangan yang berlatar belakang birokrat yang berarti bukan kader partai politik baik PAN maupun PKPI.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan, terdapat dua kader PAN yang sempat melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah dan akan bertarung dalam Pemilukada serentak kabupaten Majene tahun 2015. Mereka adalah Drs. H. Harun, MM. yang menjabat wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi Barat dan Abdul Wahab, SH. yang menjabat anggota DPRD kabupaten Majene. Bahkan Abdul Wahab, SH. sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi sebagai bakal calon wakil bupati yang berpasangan dengan Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. Adapun Drs. H. Harun, MM. belum pernah melakukan

sosialisasi secara berpasangan, bahkan sampai saat PAN telah resmi menetapkan calon yang diusungnya.

DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd. sendiri ketika Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. - Abdul Wahab, SH. melakukan sosialisasi bersama sebagai bakal calon kepala daerah, melakukan persiapan untuk maju sebagai calon perseorangan dalam Pemilukada serentak. Adapun DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd. tidak pernah terlihat bagi publik calon pasangannya. Sampai menjelang masuknya tahapan pendaftaran pasangan calon melalui jalur partai politik, dinamika politik berubah drastis ketika Abdul Wahab, SH. justru mundur dari pencalonan dan dukungan PAN resmi didaftarkan untuk pasangan Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. – DR. H. Mulyadi Bintaha, S. Pd., M. Pd.

Momentum mundurnya kader PAN dari bursa calon kepala daerah kabupaten Majene di tahapan pendaftaran calon mengindikasikan bahwa PAN tidak mempersiapkan kadernya secara matang menghadapi Pemilukada serentak. Apalagi mengingat bahwa mundurnya Abdul Wahab, SH. sebagai bakal calon wakil bupati Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. setelah hampir dipastikan maju dengan intensifnya pasangan bakal calon tersebut melakukan sosialisasi bersama justru berubah di saat-saat terakhir diduga kuat dipengaruhi oleh terbitnya PKPU No. 12 tahun 2015. Aturan tersebut secara tegas mengatur bahwa bagi anggota legislatif yang maju sebagai calon kepala daerah wajib mundur dari jabatannya.

Berdasarkan rentetan fenomena di atas, secara sederhana mengindikasikan bahwa PAN walaupun sebagai partai terbesar di kabupaten Majene, namun kaderisasi internal yang dilakukan belum cukup mampu menghasilkan banyak kader potensial untuk momentum Pemilukada serentak. Kader-kader terbaik telah habis terserap untuk mengisi jabatan pada lembaga legislatif, sehingga PAN memilih untuk mengusung pasangan calon non-kader pada Pemilukada serentak tahun 2015. Adapun dukungan kepada Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. karena hubungan interpersonalnya cukup baik dengan PAN sejak lama. Dimana pada Pemilkada tahun 2011 kabupaten Majene, PAN juga mengusung Drs. H. Rizal Sirajuddin, MM. sebagai calon bupati yang saat itu berpasangan dengan Drs. H. M. Rusbi Hamid, M. Si.

Sistem kaderisasi dalam setiap partai politik memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam partai politiknya. Adapun PAN merujuk pada AD/ART yang ada maka jenjang pengkaderan PAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jenjang Pengkaderan PAN beserta Penjelasan

No.	Jenjang Pengkaderan	Penjelasan
1	Masa bimbingan anggota	Pada tahap dasar ini anggota akan dikenalkan tentang sejarah berdirinya PAN dan masalah-masalah mendasar dalam kepartaian. Dilaksanakan oleh DPC PAN.
2	Latihan Kader Amanat Dasar	Dilaksanakan oleh DPD PAN minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
3	Latihan Kader Amanat Madya	Dilaksanakan oleh DPW PAN
4	Latihan Kader Amanat Utama	Dilaksanakan oleh DPP PAN

Idealnya kaderisasi dalam suatu partai politik perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam organisasi partai politik. Kader dan pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan tersebut dengan harapan pola kolusi dan nepotisme dapat dihilangkan demi lahirnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi.⁸

Kasus PAN di kabupaten Majene, dimana ketika tiba saat momentum Pemilu serentak kader yang hadir sebagai bakal calon kepala daerah adalah mereka yang juga sedang menjabat sebagai anggota legislatif di daerah. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kader potensial yang ada di PAN Majene hanya berkisar pada figur yang cenderung tidak berubah dari waktu ke waktu. Bahkan terdapat kadernya yang menduduki kursi DPRD kabupaten Majene hingga periode ketiga. Bahkan salah satu anggota DPRD kabupaten Majene yang lainnya adalah pada periode lalu merupakan anggota DPRD kabupaten Majene wakil partai politik lain. Demi keberlangsungan sebuah partai politik proses regenerasi kader mesti menjadi perhatian khusus untuk dibenahi. Selain itu, terkait masalah kaderisasi dibutuhkan komitmen untuk menjalankannya secara baik termasuk hubungannya dengan pengaturan jenjang karir dalam partai politik.

⁸Firmanzah.[2008]. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 71.

Pada dasarnya, perangkat ide dan aturan PAN telah cukup dapat menjadi desain yang baik untuk dapat melahirkan kader-kader yang handal. Hanya saja dibutuhkan komitmen yang kuat bagi setiap pengurus partai politik untuk dapat konsisten menjaga ide partai politik tetap diterapkan di setiap langkahnya. Konsekuensi bahwa partai politik adalah milik publik membuat roda partai politik tidak semestinya dijalankan dengan hanya menonjolkan pragmatisme, sebab publik akan menilai performa setiap partai politik terutama dalam menjalankan idenya.

Kasus diusungnya non-kader oleh PAN pada Pemilu kabupatena serentak kabupaten Majene mengindikasikan PAN lebih mengutamakan peluang untuk dapat mendapatkan kekuasaan politik dibandingkan memperjuangkan idenya dengan mendorong kadernya. Dalam hal bagaimana PAN mendapatkan *reward* dari keputusannya untuk mengusung pasangan calon non-kader adalah sulit dibuktikan. Hal itu mengingat UU No. 8 tahun 2015 yang secara tegas melarang dan sanksi bagi partai politik yang menerima imbalan dari calon kepala daerah.

Sangat sedikitnya ketersediaan dokumentasi aturan formal partai politik yang diketahui tentang dinamika proses rekrutmen politik, wajar membuat publik menyisakan pertanyaan besar perihal idealnya proses pencalonan non-kader PAN pada Pemilu kabupatena serentak kabupaten Majene. Mungkin akan lain halnya jika sebuah partai politik mengusung kadernya, sebab diketahui bersama jika setiap kader harusnya mempunyai hak istimewa dalam partainya. Oleh karena itu mekanisme rekrutmen politik yang transparan, akuntabel, mendorong kapasitas pengembangan kader partai politik, dan mendasarkan pertimbangan pada komitmen ide partai perlu menjadi perhatian khusus bagi setiap partai politik.

Penutup

kesimpulan

Dalam setiap momentum politik, DPD PAN kabupaten Majene harusnya mempersiapkan kadernya untuk dapat dicalonkan menduduki jabatan politik. Demi tujuan itu, proses kaderisasi yang dijalankan oleh PAN harusnya secara disiplin menurut ide partai dan memperhatikan adanya proses regenerasi dan jenjang karir kepartaian. Hal tersebut karena pencalonan non-kader oleh partai politik perlu dihindari demi dapat

diperjuangkannya ide partai dalam sebuah sistem politik. Hal tersebut penting untuk menjamin bahwa hanya kader partai yang dapat diharapkan secara sempurna untuk menerjemahkan dan perjuangan ide partai, setelah dilewatinya serangkaian proses kaderisasi partai. Selain itu loyalitas kader juga akan dapat lebih terjaga.

Adapun dalam hal proses rekrutmen politik, perlu dikembangkan mekanisme yang transparan, akuntabel, mendorong kapasitas pengembangan kader partai politik, dan mendasarkan pertimbangan pada komitmen ide partai. Oleh karena tanpa pemenuhan syarat tersebut membuat publik akan menilai sebuah partai politik sebagai partai pragmatis. Implikasinya akan membuat simpati terhadap partai politik tersebut akan menurun yang akan mengancam kesinambungan arah gerak dan perkembangan partai politik. Apalagi PAN dikenal sebagai partai reformis, jadi tuntutan publik untuk selalu menjaga kualitas demokrasi dan memberikan pembelajaran demokrasi juga sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Terence & Richard Dagger.[2004]. *Ideals and Ideologies*.New York: Longman.
- Firmanzah.[2008]. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kambo, Gustiana A., dan Achmad Zulfikar. 2015. *Prosiding Seminar Nasional Pilkada Serentak*. Makassar: Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Katz, Richard S. & William Crotty [2006].*Handbook of Party Politics*.London: SAGE Publication.
- Kemell, Samuel & Jacobson Gary. [2003]. *The Logic of American Politics*. Washington D. C: CQ Press.
- Lay, Cornelis. [2006]. *Organisasi dan Manajemen Kepartaian*.Yogyakarta: Program Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Luther, Kurt Richard & Ferdinand Muller Rommel. [2002]. *Political Parties in the New Europe*.New York: Oxford University Press.
- Marratu Fahri. [2011]. *Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Partai Politik*.Jurnal Dinamika Vol. 4 No.7, Juni 2011.
- Schattsneider, Elmer E. [1942]. *Party Government*.New York: Holt, Rinehart and Winston.